

Vol. 3, Tahun I  
September 2010

## DAFTAR ISI

- 1 **SALAM REDAKSI**
- 2 **ANALISIS**  
*Agama dan Misi Perdamaian*
- 4 **ULASAN SEMINAR**  
*Agama Penting untuk Perdamaian*
- 8 **LIPUTAN KHUSUS**  
*PBM Menyasar Gereja HKBP*
- 10 **ARTIKEL**  
*Pluralisme Agama dan Negara Berkeadilan*
- 12 **PUBLIKASI DAN KEGIATAN**

## REDAKSI

### Dewan Redaksi

Benyamin F. Intan  
Nimrod Sitorus  
Tandean Rustandy  
Murniaty Santoso  
Joko Prabowo  
Jani Hermawan

### Redaktur

Binsar A. Hutabarat  
Dini Y. Rachman  
R. Graal Taliawo  
Adhya Kumara

### Alamat

Jl. Raya Boulevard Barat  
Plaza Pasifik B4, 73-75  
Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14240  
Telepon: 021-45842220  
Faks: 021-45854062  
E-mail:  
reformed.crs@gmail.com

CIMB Niaga  
STEMI - Pusat Pengkajian  
430.01.00201.005

## AGAMA DAN MISI PERDAMAIAN



Narasumber Seminar RCRS "Agama dan Misi Perdamaian", 7 Agustus 2010: Pdt. Dr. Stephen Tong (keynote), Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J., Joko Prabowo, M.H. (moderator), Pdt. Dr. Benyamin F. Intan, dan Prof. Dr. Paul Marshall.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 kemerdekaan Republik Indonesia, Reformed Center for Religion and Society (RCRS) menggelar seminar "Agama dan Misi Perdamaian," 7 Agustus 2010, dengan keynote speaker Pdt. Dr. Stephen Tong (Pendiri RCRS), narasumber Prof. Dr. Paul Marshall (Senior Fellow, Hudson Institute dan RCRS), Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J. (Mantan Rektor STF Driyarkara), dan Pdt. Dr. Benyamin F. Intan (Direktur Eksekutif RCRS), bertempat di Auditorium John Calvin, Reformed Millennium Center Indonesia (RMCI), Kemayoran, Jakarta. Tujuan seminar, bagaimana agama-agama dapat mengimplementasikan misi perdamaianya pada ranah publik, khususnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mengungkapkan betapa besarnya kontribusi agama-agama dalam perjuangan kemerdekaan, demikian juga dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa agama-agama di negeri ini memiliki posisi yang terhormat, yang mempopulerkan Indonesia sebagai negeri tempat persemaian yang subur bagi agama-agama, atau "surga" bagi agama-agama.

Penyelenggaraan seminar "Agama dan Misi Perdamaian" ini menjadi penting di tengah banyaknya

konflik yang membawa-bawa nama agama, khususnya seiring dengan bergulirnya reformasi di negeri ini. Apalagi dengan adanya tudingan miring bahwa agama dalam ranah publik hanya akan menimbulkan konflik dalam masyarakat, sebagaimana umumnya diyakini negara-negara sekular barat.

Buletin Veritas Dei edisi III ini memaparkan pemikiran-pemikiran bijak yang dihasilkan dalam seminar tersebut. Setelah analisis Pdt. Dr. Stephen Tong tentang "Agama dan Misi Perdamaian," selanjutnya disajikan rangkuman seminar, "Agama Penting untuk Perdamaian." Untuk memberikan gambaran bahwa kebebasan beragama masih menjadi persoalan besar di negeri ini, khususnya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 yang menimbulkan pro kontra, liputan khusus, "PBM Menyasar Gereja HKBP" menjadi rubrik khusus terbitan kali ini, dan ditutup dengan artikel Pdt. Dr. Benyamin F. Intan, "Pluralisme Agama dan Negara Berkeadilan," yang bentuk ringkasnya pernah dimuat di kolom Opini harian Seputar Indonesia (Sindo) pada hari Rabu, 25 Agustus 2010.

Kami percaya, kehadiran Veritas Dei kali ini, seperti edisi-edisi sebelumnya, akan menjadi berkat bagi para pembaca sekalian. Selamat membaca... ■

Redaksi

## AGAMA DAN MISI PERDAMAIAN

Pdt. Dr. Stephen Tong

**I**de perdamaian bersemayam dalam hati semua orang, agama apapun dia, namun untuk mewujudkannya ternyata bukan hal yang mudah. Karena itu umat beragama harus tekun memperjuangkan perdamaian, dan perjuangan perdamaian mestinya nir kekerasan. Analisis Pdt. Dr. Stephen Tong pada Seminar Agama dan Misi Perdamaian patut disimak dalam mewujudkan ide perdamaian nir kekerasan.

Manusia selalu menginginkan dan memimpikan perdamaian. Itu sebabnya orang tua gemar menasihati anak-anak mereka untuk hidup damai. Tapi menginginkan dan memimpikan perdamaian saja tidak cukup. Untuk menciptakan perdamaian diperlukan perjuangan yang tak mengenal lelah.

Agama-agama memiliki misi perdamaian. Umat beragama memimpikan bagaimana ide perdamaian itu mewujud dalam hidup mereka. Ironisnya, umat beragama melakukan hal yang bertentangan dengan ide yang ada dalam agamanya itu. Bukananya perdamaian yang diperlihatkan, sebaliknya kekerasanlah yang mereka pertontonkan. Tepat seperti yang dikatakan Niccolò Machiavelli bahwa kita tidak berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, melainkan apa yang sedang kita lakukan, karena kita sering kali tidak melakukan apa yang harus kita lakukan.

Indonesia terkenal dengan kerukunannya, pernah memiliki presiden dengan julukan, "*the Smiling General*," namun memiliki lembaran hitam kekejaman penumpasan komunis yang amat mengerikan. Mereka yang meninggal pada peristiwa itu melebihi jumlah korban 10 tahun peperangan Vietnam. Pada tataran teori, Indone-



sia memiliki ide dan cita-cita tinggi tentang perdamaian. Tapi realitasnya jauh berbeda dengan apa yang ada pada tataran teori tersebut. Apa yang kita inginkan sering kali berseberangan dengan apa yang kita lakukan.

Perdamaian yang menjadi dambaan banyak orang menjadi lebih sulit dimengerti ketika diperhadapkan dengan banyaknya patung-patung pahlawan perang yang dibangun pada setiap negara. Semua orang mengajarkan, "jangan berperang, jadilah pembawa damai," tapi pada saat yang bersamaan masyarakat mengagungkan pahlawan-pahlawan perang. Jikalau manusia mencintai perdamaian, perang seharusnya dibenci. Tapi pada realitasnya perang menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perdamaian. Ini adalah sesuatu yang sulit dipahami.

Di Bangkok ada kuil Buddha, di dalamnya ada patung Buddha, dibuat dari batu giok besar berwarna hijau. Batu giok itu termahal di dunia, yang kemudian diukir menjadi patung Buddha. Wihara Buddha Giok itu berada di tempat yang tinggi, di mana penganut buddhisme berbakti

dan menyembah di situ. Mereka percaya di mana Buddha Giok berada, di negara itu ada perdamaian. Akibatnya, banyak orang yang percaya akan hal itu berusaha mati-matian untuk mendapatkan Buddha Giok untuk ditaruh di negaranya. Thailand dan Burma berperang terus-menerus untuk memperebutkan Buddha Giok itu.

Dari hal tersebut jelaslah perdamaian ternyata memberikan rangsangan untuk berperang. Manusia berperang untuk mewujudkan perdamaian. Agama yang seharusnya membawa keharmonisan, pemberi motivasi bersatu untuk perdamaian, ternyata tak mampu menghindari peperangan. Tragisnya, perang yang paling kejam dan mengerikan adalah perang atas nama agama.

Salah satu faktor yang memberikan rangsangan bagi penampilan bengis agama adalah adanya konsep mutlak dalam agama. Konsep mutlak itu sendiri tidak salah, karena yang mutlak itu ada, maka lahirlah konsep mutlak, meski yang dimutlakkan manusia itu belum tentu mutlak kekal.

Allah yang mutlak itu pencipta manusia, karena itu di dalam manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah memiliki konsep mutlak. Itulah yang menjadi dasar mengapa manusia mempunyai keyakinan yang tidak mau berkompromi, keyakinan itu jugalah yang menyatukan manusia dengan yang mutlak. Jadi konsep mutlak itu penting dalam beribadah, bertingkah laku, beretika, dan dalam perjuangan hidup.

Konsep mutlak itu sendiri terbagi dua, pertama yang mutlak pada dirinya, kedua yang mutlak karena dimutlakkan, atau dengan kata lain,

manusia yang memiliki konsep mutlak kemudian memutlakkan sesuatu yang tidak mutlak. Jadi sebuah ke-mutlakkan yang diciptakan oleh konsep manusia, yang sesungguhnya bukan mutlak kekal, dan ini adalah hal yang membahayakan agama apabila konsep mutlak yang tidak kekal ini dipaksakan kepada orang lain.

Semua manusia sudah berdosa, semua manusia tidak bebas dari salah, jadi manusia tidak boleh memutlakkan dirinya, apalagi memaksakan apa yang dianggap mutlak kepada orang lain, baik dengan manipulasi maupun dengan cara-cara kekerasan.

Bagi umat Kristen, Yesus adalah mutlak, Yesus satu-satunya yang mengatakan, “*I am the Truth*,” itu harus dipahami sebagai yang mutlak yang muncul dalam sejarah, bukan yang dimutlakkan manusia. Namun, Yesus juga mengajarkan untuk berdamai dengan sesama. Artinya, kedatangan Yesus yang membawa damai justru menimbulkan pertentangan, karena berita Yesus direspon dengan penolakan dan kekerasan. Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus tidak melakukan pemaksaan apalagi dengan cara-cara kekerasan terhadap mereka yang menolak pemberitaan-Nya, mereka yang melakukan kekerasan terhadap-Nya.

Yesus membiarkan diri-Nya ditimpa kekerasan, dengan cara mengorbankan diri Iaewartakan “Damai Allah.” Karena itu, pemberitaan tentang Yesus yang mutlak mestinya jauh dari kekerasan dan manipulasi.

Barangsiapa memutlakkan diri, merasa pantas mewakili Tuhan—padahal sesungguhnya berasal dari ambisi pribadi—lalu memaksakan orang lain menerima keyakinannya, itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mereka yang memutlakkan yang tidak mutlak, memutlakkan diri sebagai wakil Tuhan, kemudian

menjalankan penghakiman terhadap orang lain, akan menjadi sumber kecelakaan, peperangan, dan perusak perdamaian dalam masyarakat.

Umat beragama dapat menghindari bahaya dari konsep mutlak yang ada tersebut dengan cara hidup takut akan Tuhan, toleransi terhadap mereka yang beragama lain, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, kemudian berjuang bersama-sama menegakkan perdamaian.

Apabila umat beragama hidupnya takut akan Allah, agama apapun itu, maka agama-agama yang memiliki konsep Allah dapat meminimalkan kekerasan yang menodai sejarah perkembangan agama-agama itu. Sebaliknya, jika agama-agama yang memiliki konsep mutlak itu tidak hidup takut akan Allah, maka agama-agama itu bisa melakukan kekerasan yang lebih mengerikan dari agama-agama yang tidak memiliki konsep Allah.

Tuhan adalah Tuhan yang sabar dan toleran kepada manusia, bahkan terhadap orang yang melawan Dia sekalipun. Umat beragama harus toleran terhadap umat beragama lain karena toleransi Tuhan amat besar. Tuhan yang penuh belas kasihan, sabar dan kebesaran hatinya dapat menampung orang yang sementara ini berperilaku tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itulah, masyarakat harus belajar toleran terhadap mereka yang berbeda agama.

Sekalipun berseberangan dengan Rousseau, Voltaire menentang pembakaran buku Rousseau oleh negara, “Sebagai manusia, saya benci dengan kerajaan yang membakar bukumu. Saya akan berjuang mati-matian untuk membela HAM yang kau perjuangkan dan kau miliki.” Ini adalah pikiran yang menjadi contoh bagi segala zaman.

Kita berbeda, kita harus mengakui

bahwa perbedaan itu fakta. Itu sebabnya kita tidak boleh mengambil alih kekuasaan Tuhan dengan berperan sebagai Tuhan untuk kemudian membunuh, memaksakan apa yang kita inginkan pada orang lain. Manusia bukan algojo Tuhan, toleransi untuk menerima perbedaan harus ada.

Semua manusia itu berharga, berharkat, dan diberikan hak asasi. Ini adalah suatu penghargaan kepada sesama yang harus dimiliki semua orang. Keberagaman keyakinan adalah fakta, tetapi memaksakan keyakinan seseorang kepada orang lain merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan.

Umat beragama harus mempunyai jiwa yang lapang untuk melihat seluruh umat manusia sebagai sesama saudara meskipun memakai jubah berbeda. Manusia beragama harus berusaha menaklukkan diri, meredam nafsu, dan menghentikan ambisi liarnya, khususnya menganggap diri layak mewakili Tuhan, atau berperan sebagai Tuhan. Itu adalah musuh bersama umat manusia, yang bertentangan dengan misi perdamaian agama-agama. ■ (Ulasan Pdt. Dr. Stephen Tong, pendiri RCRS, dalam Seminar “Agama dan Misi Perdamaian”)

**DVD**



**Seminar HAM dan Kebebasan Beragama**

Pdt. Dr. Stephen Tong  
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.  
Prof. Drs. Dawam Rahardjo  
Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D.

Harga: Rp60.000

## AGAMA PENTING UNTUK PERDAMAIAN

**P**erdamaian tidak datang dengan sendirinya. Penegakkan perdamaian butuh perjuangan. Umat beragama di seluruh belahan dunia dalam hal ini harus memeloporinya. Apalagi jika memang umat beragama mengakui “Misi Perdamaian” melekat pada diri agama-agama. Pentingnya peran agama menciptakan perdamaian diteguhkan dalam seminar, “Agama dan Misi Perdamaian,” yang diselenggarakan oleh Reformed Center for Religion and Society (RCRS), 7 Agustus 2010, dengan keynote speaker Pdt. Dr. Stephen Tong (Pendiri RCRS), narasumber Prof. Dr. Paul Marshall (Senior Fellow, Hudson Institute dan RCRS), Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J. (Mantan Rektor STF Driyarkara), dan Pdt. Dr. Benyamin F. Intan (Direktur Eksekutif RCRS), bertempat di Auditorium John Calvin, Reformed Millennium Center Indonesia, Kemayoran, Jakarta. Berikut, rangkuman seminar Agama dan Misi Perdamaian tersebut.

Skeptisisme Barat—skeptisisme yang kini juga tumbuh subur di negeri ini seiring dengan banyaknya kekerasan yang mengatasnamakan agama—mengumandangkan bahwa agama tidak layak berada pada ruang publik, bahwa agama perlu dikerangkeng untuk hanya ada pada ruang privat agama. Hal ini, menurut Paul Marshall, tidak memiliki dasar yang kuat. Paul menepis anggapan bahwa agama adalah sumber konflik utama, pendapat yang sering muncul di negara-negara Barat, namun sebenarnya sedikit bukti yang mendukung akan hal ini.

Lebih lanjut Paul menjelaskan, di satu pihak memang benar ada konflik dan kekerasan bernuansa agama.



Prof. Dr. Paul Marshall  
(Senior Fellow, Hudson Institute dan RCRS)

Menolak kenyataan itu, tidak akan membawa manfaat apapun. Tapi di sisi lain, tidak ada perbedaan spesifik antar agama itu sendiri yang bisa membuatnya konflik. Sehingga munculnya agama-agama di ruang publik, seperti dipaparkan Benyamin F. Intan, bukannya membawa konflik tapi justru memiliki kecenderungan besar membawa rekonsiliasi.

Sejarah juga mencatat, konflik terjadi bukan hanya atas dasar agama tetapi atas dasar hampir semua latar belakang—uang, seks, kuasa, tanah, ideologi, dan kepercayaan. Konflik kental dengan nuansa agama karena pada saat itu semua area kehidupan manusia memang bernuansa keagamaan—perang, politik, seni, ilmu pengetahuan, filosofi. Menurut penelitian Paul, pada abad yang lalu sejarah membeberkan, paham atheisme-lah yang paling memiliki kecenderungan menjadi kekerasan, ini juga berlaku pada paham komunisme dan bentuk-bentuk atheisme yang lain.

Secara tegas Franz Magnis-Suseno mengungkap, warta perdamaian

agama-agama mestinya nir kekerasan, sekalipun penyampaian warta tersebut direspon secara negatif. Warta perdamaian agama-agama didasarkan pada kebaikan hati pemeluk agama, tanpa pamrih apapun.

Karena itu, agama-agama sepatutnya menampilkan wajah perdamaian, bukan wajah bengis yang bertentangan dengan misi agama-agama. Penampakan wajah bengis agama yang terbaca dalam sejarah agama-agama, demikian juga terkait dengan kekerasan agama di Indonesia menurut ketiga narasumber, terutama berkaitan dengan politisasi agama dan agamaisasi politik.

Mengutip TB Simatupang, Benyamin menjelaskan, agama-agama yang ada di Indonesia dulunya lahir sebagai anak tunggal—Islam di Arab, Kristen di Palestina, dan seterusnya. Sebagai anak tunggal di tempat asalnya, agama-agama sudah terbiasa diistimewakan dan dimanjakan, sehingga ketika berada di lingkungan di mana dia punya kakak, adik, maka konflik agama mulai muncul. Menurut Benyamin, salah satu penyebab utama konflik agama adalah *fact of pluralism*, agama-agama tidak mampu menerima fakta kemajemukan agama.

Banyaknya kekerasan agama, khususnya pada era reformasi memang bukan warisan sejarah Indonesia. Kekerasan agama juga tidak terkait pada agama itu sendiri, yang pada dirinya melekat misi perdamaian. Kekerasan agama, sebaliknya, lebih disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar agama itu sendiri, utamanya perebutan kekuasaan politik, yang kemudian mewujudkan baik berupa politisasi agama atau pun agamaisasi politik.

Hadirnya perda-perda bernuansa

agama, baik perda bernuansa agama Islam (Perda Syariah), maupun perda bernuansa agama Kristen (Perda Injil) dapat dipastikan terkait dengan hal itu, yang pada akhirnya merugikan agama-agama itu sendiri. Agama-agama dapat memberikan kontribusi positifnya pada pembangunan bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia, demikian ungkap Benyamin lebih lanjut, apabila tidak “lengket” dengan politik dan mampu memposisikan dirinya secara tepat.

Apabila umat beragama meyakini bahwa semua agama punya misi perdamaian di dalam dirinya, maka seharusnya tidak ada pemberitaan agama yang bertentangan dengan misi perdamaian agama-agama itu. Ambivalensi agama, yang menampilkan wajah garang sekaligus wajah perdamaian, menurut Magnis, antara lain disebabkan kesalahan dalam menafsir teks-teks agama.

Dengan mengutip Injil Lukas, Magnis menjelaskan bahwa ungkapan Yesus, “Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang” (Matius 10:34), atau “Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan” (Lukas 12:51), tidak boleh diartikan sebagai pembenaran untuk memaksa atau memerangi orang yang menolak mengikut Yesus. Sejarah Gereja melaporkan banyak kekerasan dalam pemberitaan Injil terjadi karena ayat tersebut dijadikan pembenaran penggunaan kekerasan untuk memaksa orang masuk ke dalam gereja.

Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan Raja Spanyol sekitar tahun 1508 setelah mengalahkan kaisar Muslim di Andalus yang kemudian menetapkan undang-undang bahwa setiap orang Yahudi dan Islam harus

memilih dan bersedia dibaptis untuk menjadi Kristen, atau keluar meninggalkan Spanyol. Mereka yang memilih menjadi Kristen diberikan Injil Barnabas (Injil Barnabas tidak termasuk dalam kanon — ekstra kanon) yang ditulis oleh seorang Muslim berkebangsaan Spanyol, yang dipaksa dibaptis pada pertengahan abad ke-16 di kota Roma.

Ayat ungkapan Yesus tersebut mestinya ditafsirkan bahwa sebagai pewarta kebaikan dan cinta kasih, Yesus telah mengalami penolakan, karena itu seperti Yesus sendiri mengalami penolakan, maka mereka yang mengikuti Yesus tak perlu heran jika dikucilkan dan mengalami perlakuan-perlakuan buruk seperti yang dialami Yesus, bahkan bisa jadi akan ada perpecahan di dalam keluarga. Tetapi mereka yang mengikut Yesus dengan hati yang tulus tidak akan terbakar dengan kebencian dan dikuasai kepahitan, sebaliknya tetap mencintai orang yang menganiaya mereka. Melalui sikap mengasihi musuh ini, mereka yang mengikuti Yesus menjadi saksi Kristus dalam masyarakat. Diperlakukan dengan baik, membalas dengan baik. Diperlakukan dengan buruk, tetap membalas dengan baik. Itulah yang kita teladani dari Yesus.

Bagi Magnis, damai pertama-tama merupakan pemberian Allah, hadiah dari Allah, selanjutnya merupakan tugas bagi mereka yang mau taat kepada Allah untuk menyemaikannya. Damai dinikmati oleh mereka yang membangun sikap-sikap Yesus dalam hati mereka. Sebagaimana dikatakan Injil, “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.” atau “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.” Jadi jelaslah, agama-agama sesungguhnya memi-



**Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J.**  
(Mantan Rektor STF Driyarkara)

liki misi perdamaian, dan orang beragama berkewajiban mewartakan perdamaian.

Agama-agama tidak akan menampilkan wajah bengisnya apabila misi perdamaian agama dikumandangkan dengan cara yang benar. Agama-agama tidak boleh memaksakan perdamaian dengan cara kekerasan. Karena kekerasan selalu saja menimbulkan kekerasan, dan perdamaian tidak mungkin tercipta dengan cara kekerasan, sebaliknya harus melalui penegakkan hukum.

Perjuangan untuk mengusahakan perdamaian secara damai dapat terwujud dengan memupuk sikap toleransi antar agama dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Apabila hal ini dilakukan maka konsep mutlak yang ada dalam agama-agama, yang amat penting dalam beribadah tidak akan menjadi persoalan. Karena konsep mutlak agama tidak boleh menjadi pembenaran untuk memaksakan konsep mutlak agama pada orang lain, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Itu sama saja dengan menghina martabat manusia yang mulia yang diagungkan oleh agama-agama.

Untuk menghapus benih kecurigaan

terhadap agama yang berbeda diperlukan dialog antar agama. Dialog yang jujur antar agama ini bisa terjadi jika ada penerimaan terhadap pluralisme agama. Pluralisme agama disini tidak boleh diartikan bahwa semua agama sama saja. Ini berarti menyangkali identitas agama-agama yang berbeda itu. Menerima pluralisme agama berarti menghargai mereka yang berbeda agama sebagai rekan dalam kehidupan bersama. Penerimaan atas pluralisme agama inilah yang memungkinkan agama-agama bisa memberikan kontribusinya bagi perdamaian.

Selain dialog antar agama, yang lebih penting dari itu adalah kerjasama antar agama dalam menjalankan misi perdamaian. Adanya organisasi-organisasi interkomunal yang terbentuk dalam kerjasama antar agama sangat penting untuk meredam kekerasan yang membawa nama agama. Rumor negatif yang bisa memicu konflik dan kekerasan tidak akan berdampak luas jika organisasi-organisasi interkomunal itu bekerja dengan baik. Masyarakat yang hidup saling percaya dan saling menerima akan sangat sulit terprovokasi, sekalipun oleh isu yang terkait dengan agama.

Konflik agama sesungguhnya hanya bisa diselesaikan oleh agama-agama itu, bukannya dengan menggunakan tangan pemerintah. Apabila kerjasama antar agama bertumbuh subur di negeri ini, maka agama-agama itu akan mampu menyelesaikan konflik yang terkait dengan dirinya.

Kerjasama antar agama sesungguhnya juga bisa menjadi tempat dimana agama-agama itu dapat mempromosikan kebajikannya. Benyamin mengungkapkan, orang Kristen bukan hanya stop berbuat jahat, tetapi juga harus melakukan perbuatan baik, sebagaimana dikatakan Efesus 2:10, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus un-



**Pdt. Dr. Benyamin F. Intan**  
(Direktur Eksekutif RCRS)

tuk melakukan perbuatan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." Tetapi, berbuat baik membawa misi perdamaian, menurut Benyamin, "Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, ada harga yang harus dibayar, bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya".

Menurut Benyamin, agama-agama dapat tekun berjuang untuk mewujudkan perdamaian karena mereka memiliki cinta kasih dalam hati mereka, dan perjuangan umat beragama dilakukan dengan mengandalkan *power of love*, yang jauh dari kecintaan pada kuasa, *love of power*. Dalam Markus 10, Yesus mengatakan umat beragama jangan seperti pemerintah yang memerintah dengan tangan besi, atau penguasa-penguasa yang memerintah dengan mempertontonkan kekerasan, ini adalah *love of power*, cinta kuasa. Yesus mengajarkan kalau kamu mau menjadi tuan, mau menjadi pemimpin, jadilah hamba. Untuk menjadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. "Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang."

Untuk menghindari kekerasan, agama-agama seharusnya mengajar-

kan prinsip-prinsip kemanusiaan, cinta kasih, keadilan, dan bagaimana hidup menaati hukum. Di dalam mencegah kejahatan, agama-agama juga harus melakukan suatu pembinaan moral, suatu pembinaan kepada umat beragama dalam lingkungannya masing-masing. Dalam hal ini jelas pemahaman yang baik dari agama yang dipeluk oleh umat beragama menempati posisi yang penting.

Mengutip William Frankena, Benyamin menjelaskan, tugas agama-agama dalam misi perdamaian bukan sekedar tidak menimbulkan kejahatan (*not to inflict evil or harm*), tapi lebih dari itu, agama mesti berfungsi mencegah kejahatan (*to prevent evil*) dan berniat sungguh-sungguh menghapus kejahatan (*to remove evil*), bahkan harus mempromosikan kebaikan (*to promote good*)—sebuah kualitas tertinggi dari nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Itulah yang terkandung dalam misi perdamaian agama-agama.

Lebih jauh Benyamin menawarkan gagasan bagaimana agama-agama itu bisa hidup bersama secara damai. Menurutnya setidaknya ada tiga pola hidup bersama. Pertama, *live and let die*. Maksudnya adalah siapa yang mayoritas, atau siapa yang kuat, merekalah yang dapat hidup, di sini berlaku hukum rimba, sikap ini harus ditolak oleh agama-agama. Kedua, *live and let live*. Pada pola ini umat beragama sama-sama hidup tapi tidak ada interaksi di antara mereka, "Kamu jangan mengganggu saya, maka saya tidak akan mengganggu kamu". Ini pun bukan pilihan yang tepat meski lebih baik dari pilihan yang pertama. Sikap ketiga, *creative proexistence*. Keberadaan saya dan keberadaan orang lain sama-sama saling memiliki ketergantungan. Ini adalah pilihan yang tepat, sebagaimana dikatakan Alkitab, "Usahkanlah kesejahteraan kota di mana engkau berada, karena

kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga.”

Hidup bersama dalam bingkai *creative proexistence* dapat terawat dengan baik apabila agama-agama mempromosikan *Golden Rule*, atau “Kaidah Kencana.” Menurut John Hick *Golden Rule* ini ada dalam agama-agama dengan berbagai macam variasi. “Apa yang engkau inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu dahulu,” atau dalam bentuk negatifnya, “Jika engkau tidak ingin seseorang berbuat sesuatu kepadamu, jangan lakukan hal itu kepada orang lain.”

Kesadaran akan pentingnya pengakuan interpedepensi agama-agama bisa bertumbuh dengan subur apabila agama-agama itu mempromosikan *common grace* (anugerah umum). Yesus berkata dalam Matius 5 bahwa Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Kacamata, mungkin ditemukan oleh orang bukan Kristen, tetapi bisa berguna bagi orang Kristen dan agama-agama lain. Demikian juga Aljabar yang ditemukan oleh Islam, dapat berguna bagi agama-agama lain. Begitu pula dengan orang Kristen, juga menemukan hal-hal lain yang berguna bagi agama-agama lain. Ini jelas menunjukkan bahwa agama-agama bergantung satu sama yang lain.

Akhirnya Benyamin menyimpulkan, misi perdamaian adalah sesuatu yang *feasible*, karena itu harus dikonkretkan oleh setiap agama melalui misi di dalam pengajaran masing-masing agama. Apalagi jika umat beragama benar-benar meyakini bahwa agama-agama memiliki peran penting di dalam pembangunan perdamaian. ■ (Binsar A. Hutabarat, Dini Y. Rachman)

## Tentang RCRS

*Reformed Center for Religion and Society (RCRS) adalah lembaga kajian agama dan masyarakat dengan tujuan mewujudkan peran umat Kristen dalam pembangunan bangsa dan negara. Suatu penunaian “Mandat Budaya” untuk mengusahakan dan membudidayakan ciptaan Allah (Kejadian 1:28), dengan fokus menyuarakan kebenaran Allah membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan.*

*Kehadiran lembaga ini sangat penting mengingat kondisi Indonesia yang sarat dengan gejala konflik khususnya terkait SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Padahal Indonesia yang berdasarkan Pancasila sangat menghargai peran penting agama dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.*

*Misi RCRS mendorong peran sosial agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebebasan beragama mencakup keduanya, kebebasan memeluk agama dan kebebasan menjalankan ajaran agama. RCRS meyakini kebebasan beragama juga berarti kebebasan menjalankan peran publik agama, yakni fungsi kritis dan tugas profetis agama di dalam meletakkan landasan moral, etik dan spiritual dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.*

*Karena itu, perjuangan RCRS bersifat menyeluruh, mencakup kepentingan rakyat banyak, tidak sebatas kepentingan Kristen belaka. RCRS percaya bahwa kebenaran Kristen dalam Mandat Budaya adalah kebenaran yang intrinsik, artinya, sekalipun memiliki fondasi iman Kristen secara “unik,” kebenaran yang diperjuangkan bersifat inklusif—dapat diterima dan membawa manfaat bagi semua pihak.*

*Melalui publikasi, pelatihan, workshop dan seminar, RCRS berupaya mempengaruhi opini publik (public opinion) dengan memperlengkapi dan memberdayakan warga masyarakat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam setiap elemen sosial masyarakat—apakah itu dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kerja, keluarga, dan lain-lain sebagainya.*

*RCRS terpenggil mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang bermoral dan beretika, serta berdedikasi tinggi. Melalui program-programnya, RCRS mempersiapkan kader generasi penerus dengan menggali potensi dan talenta yang masih terpendam, menanamkan arti kepemimpinan sebagai penatalayanan (stewardship), serta memberikan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.*

*Untuk mempengaruhi kebijakan publik (public policy), RCRS berupaya mengkaji permasalahan dalam bentuk riset dan studi, memberikan input dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, melakukan pengawasan dan advokasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, serta mensosialisasikan peraturan legal kepada masyarakat luas.*

## PBM MENYASAR GEREJA HKBP

**P**ro-kontra sengit terjadi ketika pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 tentang Izin Rumah Ibadah yang adalah revisi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri 1969. Alasan utamanya jelas, peraturan tersebut cenderung mengekang kebebasan beragama.

Sejak ditetapkannya, PBM langsung menyasar gereja-gereja kecil yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan, yakni mendapat persetujuan dari 60 orang warga sekitar, dan jumlah jemaat minimal 90 orang dewasa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam usianya yang terbilang muda itu, PBM kemudian juga menyasar gereja-gereja besar, seperti yang dialami Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang pada tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-150, yang telah memiliki 3.789 gereja dengan sekitar 5 juta anggota jemaat. Demikian pula dialami oleh Gereja Kristen Indonesia (GKI) misalnya GKI Taman Yasmin, Gereja Protestan Indonesia Bagian barat (GPIB), antara lain GPIB Galaksi, juga beberapa Gereja Katolik, seperti yang terjadi di Harapan Indah Bekasi dan Purwakarta, dll.

Menurut Pdt. Eron M. Tampubolon, Praeses HKBP Distrik XIX Jakarta 2, dalam sebuah konferensi pers yang di gelar di Jalan Puyuh, Bekasi, di Gereja Pondok Timur Indah yang disegel pemerintah kota Bekasi, sejak diberlakukannya PBM puluhan gereja HKBP di Indonesia telah mengalami gangguan dan hambatan dalam menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah. Kasus-kasus yang menjadi berita luas



**Pdt. Ramlan Hutahaean, M.Th (Sekretaris Jenderal HKBP) bersama dengan Pendeta-pendeta HKBP dalam Konferensi Pers Jumat, 27 Agustus 2010 di Pondok Timur Indah, Bekasi.**

terjadi pada HKBP Pondok Timur Indah, Filadelfia, Jatimulya, Cinere, Sibuhuan. Alasannya sama, yakni soal ijin rumah ibadah.

Kejadian tragis terjadi pada HKBP Sibuhuan, kabupaten Padang Lawas (Palas), Tapanuli Selatan yang dibakar massa 22 Januari 2010, dan HKBP Pondok Timur Indah yang beberapa jemaatnya mengalami kekerasan, penganiayaan ketika menjalankan ibadah. Pdt. Luspida Simanjuntak, pimpinan gereja tersebut juga tidak luput dari tindak kekerasan tersebut.

Kekerasan yang dialami oleh HKBP Pondok Timur Indah, khususnya yang terjadi pada 1 Agustus 2010, dan 8 Agustus 2010 menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) HKBP, Pendeta Ramlan Hutahaean, telah menyadarkan gereja dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia itu bahwa kebebasan beragama bukan hanya masih menjadi barang mewah bagi gereja-gereja kecil, tetapi juga HKBP yang mampu memenuhi syarat-syarat pendirian rumah ibadah dalam PMB, khususnya berdasarkan jumlah anggota jemaatnya.

Ramlan Hutahaean menyebut peristiwa kekerasan terhadap HKBP Pondok Timur Indah yang tak masuk akal itu *"golden moment,"* yang menyatukan gereja yang pernah terpecah-pecah di era Orde Baru, dan membawa jemaat HKBP di Indonesia dan luar negeri bersehati datang kepada Allah untuk memohon kemurahan Tuhan atas apa yang dialami oleh HKBP Pondok Timur.

Peristiwa dramatis yang dialami HKBP Pondok Timur terjadi karena ketaatan mereka pada pemerintah daerah yang menetapkan Ciketing, Mustika Jaya, Bekasi sebagai tempat beribadah. Karena ketaatan pada pemerintah, mereka harus beribadah dengan beratapkan langit di Ciketing yang masih berupa tanah kosong, dan itu terjadi setelah selama dua puluh tahun beribadah dengan berpindah-pindah. Terakhir gereja mereka yang terletak di Jalan Puyuh Raya disegel oleh pemerintah kota Bekasi.

Ironisnya, di tempat yang sangat tidak memadai tersebut mereka justru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama. Ibadah HKBP

Pondok Timur Indah yang amat mencekam terjadi justru pada tempat yang ditetapkan pemerintah kota, di Ciketing pada tanggal 11 Juli 2010, 18 Juli 2010, 25 Juli 2010, 1 Agustus 2010, dan 8 Agustus 2010. Pada ibadah minggu 1 Agustus dan 8 Agustus jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah bukan hanya dihalang-halangi, diganggu tetapi juga diserang oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan agama. Puluhan jemaat luka-luka, terutama kaum perempuan. Pada peristiwa ini jelas pemerintah telah melakukan kejahatan berupa pembiaran terhadap kelompok-kelompok anarkis untuk menebar teror.

Sejak tanggal 11 Juli 2010, hingga saat ini, jemaat HKBP Pondok Timur beribadah dengan perasaan takut dan cemas karena bisa saja mereka tiba-tiba diserang massa seperti yang mereka alami pada kejadian dua hari minggu pada awal bulan Agustus. Mereka tetap beribadah di tempat tersebut karena itu adalah tempat milik mereka dan pemerintah kota telah menetapkan hal tersebut. Jadi sangat tidak beralasan jika pemerintah membiarkan kekerasan terus terjadi.

Pemerintah seharusnya bertindak tegas pada pelaku tindak kriminal tersebut. Gangguan yang dialami oleh HKBP Pondok Timur Indah dalam beribadah membuktikan bahwa kelompok minoritas masih belum bebas dalam beribadah, tugas pendeta Lus-pida. Siapapun dia, atau kelompok apapun tidak berhak menolak berdirinya gereja di daerah Mustika Jaya, demikian juga pada daerah-daerah lainnya. Kebebasan beragama dan kebebasan mendirikan tempat ibadah adalah mandat konstitusi RI, dan pemerintah wajib memfasilitasinya.

Perasaan duka yang menyelimuti warga HKBP kemudian diungkapkan dalam ibadah syukur dan peringatan 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Bekasi, yang di-



**Spanduk penolakan kebaktian HKBP Pondok Timur Indah di lahan kosong milik HKBP di Ciketing, Mustika Jaya, Bekasi.**



**Pelaksanaan kebaktian minggu gereja HKBP Pondok Timur Indah pada hari Minggu, 29 Agustus 2010.**

hadiri sekitar sebelas ribu orang dari berbagai gereja dan agama. Pada kesempatan itu HKBP Jabodetabek bersama dengan jemaat gereja-gereja lain, juga kelompok-kelompok yang mengusung kebebasan beragama menggelar doa keprihatinan untuk kemerdekaan mendirikan tempat beribadah Minggu 29 Agustus 2010. Pada pertemuan itu, hadir juga pendeta-pendeta dari berbagai gereja HKBP di Jabodetabek, pendeta-pendeta dari berbagai gereja lainnya, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Dr. A.A. Yewangoe, Walikota Bekasi,

Mochtar Mohammad, dan anggota DPR Syukur Nababan.

Dalam khotbahnya, Pdt. Ramlan Hutahaean mengatakan, PBM harus dicabut karena telah menghalang-halangi pendirian rumah ibadah dan melanggar kebebasan beragama. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Syukur Nababan, PBM terbukti telah menimbulkan konflik agama dan karena itu harus dicabut. ■ (Binsar A. Hutabarat, Dini Y. Rachman, R. Graal Taliawo)

# PLURALISME AGAMA DAN NEGARA BERKEADILAN<sup>1</sup>

Pdt. Dr. Benyamin F. Intan

Menjelang HUT ke-65 Republik Indonesia, Forum Solidaritas Kebebasan Beragama (FSKB) menggelar ibadah bersama di depan Monas, Jakarta, 15 Agustus 2010. Aksi solidaritas ini menyuarakan, setiap orang memiliki hak beribadah, dan secara bersamaan prihatin bahwa di negeri yang merdeka ini masih ada individu atau kelompok minoritas yang belum bebas beribadah, bahkan kerap mengalami kekerasan ketika menjalankan kewajiban ibadah mereka.

Kejadian tragis menimpa Gereja HKBP Pondok Timur Indah di Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Tiga minggu berturut-turut jemaat mengalami gangguan ibadah, bahkan 8 Agustus 2010, ketika melaksanakan ibadah mereka, beberapa jemaat mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan sekelompok orang. Bahkan Pdt. Luspida Simanjuntak, pimpinan gereja tersebut tidak luput dari tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Sangat disayangkan, kelompok agama dan kepercayaan minoritas belum menikmati buah manis multikulturalisme. Perlakuan diskriminatif dan tindak kekerasan dialami kelompok minoritas karena ajaran mereka dianggap sesat (*heresy*) atau tidak sesuai (*unorthodoxy belief*) dengan ajaran kelompok yang lebih besar. Pembakaran dan penyerangan terhadap rumah ibadah minoritas oleh kelompok agama tertentu masih terus terjadi.



Kasus-kasus ini terus berulang karena aparat negara tidak banyak berperan dalam pencegahan tindak kekerasan. Menurut jajak pendapat Kompas (22/2/10), separuh lebih responden (56,5 persen) menyatakan negara kurang melindungi kelompok yang tergolong relatif kecil secara kuantitas dari tindak kekerasan kelompok lain. Negara lalai memproteksi kebebasan beragama warganya seperti digariskan konstitusi. Sadar atau tidak, negara telah melakukan kejahatan pembiaran (*crime by omission*).

Akibat tindakan pembiaran, *heresy* dan *unorthodoxy belief* yang tadinya tidak mengganggu kepentingan umum, mulai dianggap membahayakan kehidupan publik. Kepercayaan mulai dipolitisasikan. Terjadi apa yang dinamakan *politicized belief*. Sadar atau tidak, aksi pembiaran negara telah mengeskalasi level intoleran dari *heresy* dan *unorthodoxy belief* kepada *politicized belief*. Dalam *politicized belief*, negara memolitisasi agama. Ke-

berpihakan (pasif) negara terhadap kelompok mayoritas bukan tanpa tujuan, ujung-ujungnya kelangggengan kekuasaan negara.

Pelanggaran negara tidak hanya sebatas aksi pembiaran tapi mencakup tindakan aktif negara (*crime by commission*). Setara Institute for Democracy and Peace mencatat dari 291 aksi pelanggaran kebebasan beragama di tahun 2009, terdapat 139 tindakan pelanggaran yang melibatkan negara, dimana 101 tindakan aktif negara dan 38 aksi pembiaran oleh negara. Akibat tindakan aktif negara, *heresy* dan *unorthodoxy belief* tidak lagi sekedar *politicized belief* tapi telah berevolusi menjadi *seditionary belief*, suatu kepercayaan/ideologi yang membahayakan eksistensi negara. Itu sebabnya butuh tindakan aktif negara. Amat disayangkan, kehadiran negara menjadi kontraproduktif: bukannya menjamin kebebasan beragama warganya, tapi malah jadi sumber masalah. Keadilan yang menjadi tugas pokok utama negara, hilang tanpa membekas.

## Prinsip Regulasi

Terciptanya kebebasan beragama butuh peran negara. Bukan hanya peran negatif negara untuk tidak berkontraproduktif, tapi peran positif negara di dalam menjamin dan memproteksi kebebasan beragama. Negara memang tidak boleh meregulasi kehidupan beragama. Tapi negara bukan hanya diperbolehkan bahkan diharuskan membuat regulasi untuk menjamin kebebasan beragama. Negara harus memandang kebebasan

1. Bentuk ringkas artikel ini pernah dimuat di kolom Opini harian Seputar Indonesia (Sindo), Rabu, 25 Agustus 2010.

beragama sebagai hak-hak sipil yang harus dilindungi.

Pembuatan regulasi kebebasan beragama oleh negara, menurut Reinhold Niebuhr, harus berpedoman pada “prinsip regulasi” (*regulative principle*) dimana kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) menjadi elemen dasar. Tanpa kedua elemen ini, mustahil menegakkan keadilan negara. Sehingga bagi Niebuhr, tuntutan kebebasan beragama bukan hanya sebatas jaminan kebebasan, tapi juga mencakup jaminan atas perlakuan yang sama (“Liberty and Equality,” 185-198).

Regulasi jaminan kebebasan oleh negara sejatinya memberi ruang kebebasan seperti digariskan konsistensi. Artinya, negara perlu membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Beragama sebagai implementasi dari pasal 29 UUD 1945. Sangat disesalkan banyak pihak, kebebasan beragama yang begitu penting belum memiliki dasar jaminan hukum setingkat Undang-Undang. Dengan hadirnya UU Kebebasan Beragama, negara diharapkan tidak lagi melakukan pembiaran, apalagi tindak aktif pelanggaran kebebasan beragama.

Jaminan atas perlakuan yang sama oleh negara pertama-tama dilakukan dengan menghapus semua peraturan kenegaraan yang bersifat diskriminatif. Cukup banyak peraturan diskriminatif setingkat UU, penetapan Presiden, keputusan Menteri, dan peraturan daerah yang perlu dicabut. Upaya memperjuangkan anti-diskriminatif sejatinya bermuara pada ketegasan negara menganulir tindak kekerasan suatu kelompok agama terhadap kelompok agama lain.

### Keadilan Minoritas

Kehadiran regulasi jaminan kebebasan dan perlakuan yang sama tidak sertamerta menjamin keadilan kelompok agama minoritas. Kedua macam regu-

lasi ini baru membebaskan kelompok minoritas dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Tapi belum mampu mengakomodir apa yang David Hollenbach katakan sebagai hak partisipasi minoritas (*minority rights of participation*). Bagi Hollenbach, partisipasi minoritas adalah *test case* bagi negara berkeadilan. Membiarkan masyarakat mengesampingkan hak-hak minoritas sama artinya melanggengkan ketidakadilan (*The Common Good and Christian Ethics*, 173-211).

Dengan kata lain, kelompok minoritas butuh keberpihakan negara mendorong partisipasi mereka. Dalam kerangka negara Pancasila, di dalam menjalankan kebebasan beragama, pemerintah seyogianya melakukan dwifungsi: bukan hanya menjamin dan melindungi kebebasan beragama (fungsi negatif), tapi juga mendorong serta memotivasi pertumbuhan dan perkembangan hak kebebasan beragama umat minoritas (fungsi positif).

James Skillen menolerir keberpihakan negara pada kaum minoritas sejauh berada dalam koridor *sphere of responsibility* negara yang menjunjung tinggi keadilan (*Political Order and the Plural Structure of Society*, 413). Artinya, dorongan partisipasi minoritas oleh negara semata-mata dilandaskan pada keinginan luhur untuk menegakkan prinsip keadilan semata, dan bukannya malah menimbulkan ketidakadilan baru pada mayoritas.

*Sphere of responsibility* juga berarti, keberpihakan negara tidak boleh keluar dari yurisdiksi negara, sampai mencampuri apalagi meregulasi urusan internal kelompok minoritas. Meminjam istilah Michael Walzer, keberpihakan negara harus dibatasi pada tataran “at” *the boundaries* dan bukannya “across” *the boundaries* dari agama minoritas (*Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*,

15, 282). Singkatnya, keberpihakan negara pada kaum minoritas dalam koridor *sphere of responsibility* semata-mata demi keadilan.

Mewujudkan buah manis multikulturalisme dalam rangka HUT ke-65 Kemerdekaan Indonesia di ranah pertemuan agama-agama memang tidak mudah. Tapi bukan hal mustahil. Peran aktif negara berkeadilan salah satu solusi utamanya. ■ (Penulis adalah Direktur Eksekutif RCRS)

DVD



### Seminar Calvinisme, Demokrasi Global dan Penerapannya di Indonesia

Pdt. Dr. Stephen Tong (keynote)  
Prof. Stephen Chan, Ph.D.  
Muhammad A.S. Hikam, Ph.D.  
Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D.

Harga: Rp60.000

DVD



### Seminar Nasionalisme dan Pluralisme Global

Pdt. Dr. Stephen Tong  
K.H. Abdurrahman Wahid  
Drs. Christianto Wibisono

Harga: Rp75.000

# Publikasi & Kegiatan

## DVD



### Seminar Agama dan Misi Perdamaian

Pdt. Dr. Stephen Tong (keynote)  
Prof. Dr. Paul Marshall  
Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, S.J.  
Pdt. Dr. Benjamin F. Intan

Harga: Rp75.000



Seminar RCRS “Agama dan Misi Perdamaian”, 7 Agustus 2010, dihadiri sekitar 800 peserta.

## BUKU



**Judul:**

The Global Nexus

**Penulis:**

Christianto Wibisono

**Penerbit:**

Reformed Center for Religion and Society, Jakarta, 2007

**Tebal:**

329 halaman

**ISBN:**

978-9791620307

**Harga:**

Rp100.000



Narasumber Seminar RCRS “HAM dan Kebebasan Beragama”, 28 April 2006: Wim Tangkilisan (moderator), Pdt. Dr. Benjamin F. Intan, Pdt. Dr. Stephen Tong, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, dan Prof. Drs. Dawam Rahardjo.



Narasumber Seminar Terbatas RCRS “Perda Bernuansa Agama”, 12 Agustus 2007: Ahmad Suaedy (Wahid Institute), Dr. Yudi Latif (Reform Institute), Joko Prabowo, M.H. (moderator), dan Pdt. Dr. Benjamin F. Intan (RCRS).